

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap individu membutuhkan pendidikan, dan pendidikan juga merambah semua aspek kehidupan dan memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan pemikiran individu dan kebiasaan perilaku. Menempuh jalur pendidikan dapat dijadikan individu sebagai solusi untuk meraih kehidupan yang lebih baik serta layak. Namun, realita kehidupan atau realita lapangan keadaan dunia nyata sering dijumpai dikotomi sekolah dan murid di dalamnya. Dikotomi dunia pendidikan formal (sekolah) merupakan gambaran nyata pendidikan bagi masyarakat atas dasar adanya klasifikasi ekonomi, bermutu, pendidikan elite, mahal, dan menjadi tempat bagi anak – anak yang mempunyai kualitas akademik yang tinggi.

Menurut UUD 1945, pemberian pelayanan pemerintah di bidang pendidikan secara merata dan adil untuk seluruh warga Indonesia serta menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Dalam praktiknya, layanan pendidikan sangat terkesan dengan kemampuan memberikan terapi yang berbeda kepada siswa. Banyaknya opini masyarakat tentang sekolah unggulan atau sekolah favorit dianggap mampu memberikan pelayanan yang lebih baik dibandingkan layanan yang diberikan oleh sekolah lain yang tidak dianggap terbaik dan favorit oleh masyarakat umum.

Dengan adanya dikotomi ini maka melahirkan kesenjangan pada mutu pendidikan yang diperoleh dan mengakibatkan terciptanya sebuah pelabelan suatu sekolah sebagai contoh sekolah anak orang kaya, sekolah anak-anak hebat,

sekolah para atlet, sekolah anak pejabat, sekolahnya orang miskin, sekolahnya anak-anak bodoh, sekolahnya anak-anak nakal, dan lain sebagainya. Dengan kondisi sekolah-sekolah yang terkotak-kotak seperti sekolah *elite* hanya akan menjadikannya sebagai alat reproduksi dalam pembentukan kesenjangan sosial¹.

Jika dilihat dalam prosesnya dapat ditelusuri bahwa dikotomi tersebut muncul tidak lain disebabkan karena proses penerimaan awal atau *intake* siswa. Jika sekolah memiliki standarisasi tinggi pada proses masuk, maka tinggi kemungkinan sekolah tersebut akan memiliki peserta didik dengan kualitas yang tinggi. Sebaliknya, jika sekolah tidak menerapkan standarisasi pendidikan yang tinggi maka input yang masuk (siswa) dalam sekolah tersebut berasal dari kalangan biasa. Konsekuensinya adalah sekolah tersebut mendapatkan siswa-siswa yang memiliki NEM rendah, serta siswa yang kurang berprestasi.

Ketimpangan sosial tentu menjadi sebuah bentuk keprihatinan dari pemerintah atas fenomena pendidikan yang terjadi selama ini. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia memberi perintah kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk membuat kebijakan yang dikenal dengan kebijakan sistem zonasi sekolah, yang diatur dengan detail dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Siswa Baru di Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)². Yang utama dan terpenting, ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA), ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), atau kualifikasi yang setara. Demi menjamin kesinergisan antara Pemerintah Pusat

¹ Taufiqqurohman, *Skripsi*: “Sekolah Elit sebagai Alat Reproduksi Kesenjangan Sosial”. Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga. Hal: 1- 78

² Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018

dengan Pemerintah Daerah, Peraturan Gubernur Jawa Tengah pasal 32 Nomor 7 Tahun 2021 tentang pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru (PPDB) pada Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB) di dalam lingkup Provinsi Jawa Tengah, dimana kebijakan tersebut berlaku, telah diumumkan untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut diikuti. Sistem kebijakan zonasi di kawasan diatur dengan peraturan yang berlaku di kawasan ini.

Dapat diketahui sistem zonasi adalah kebijakan yang diselenggarakan pada proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berdasar dengan radius dan juga jarak dari sekolah dengan jarak yang ada pada googlemap³. Sebelum adanya zonasi pada dunia pendidikan terutama pada sistem penerimaan peserta didik baru masyarakat lebih akrab dengan istilah “rayonisasi”. Sistem rayonisasi sendiri sudah pernah diatur oleh PERGUB tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah SMA dan SMK Negeri di Provinsi Jawa Tengah.

Perbedaan sistem zonasi dan rayonasi terletak pada konsep masing-masing sistem, dimana sistem rayonasi lebih memperhatikan *cluster* wilayah terdekat dengan sekolah tertentu. Jika ada seorang siswa yang di luar kota atau di wilayah kabupaten meskipun berjarak dekat tetap saja berada di luar rayon. Dibandingkan dengan sistem zonasi siswa di luar kabupaten selama alamat rumah atau alamat Kartu Keluarga (KK) dengan sekolah masih pada jarak radius yang ditentukan siswa masih bisa mendaftar sekolah tersebut.

³ Purwanti, Dian et al. 2019. “Efektivitas Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Bagi Siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan”. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara. Vol. 5, No.1.Hal: 3

Kata “zonasi” di Indonesia sudah sering didengar dan dibicarakan oleh masyarakatnya. Zonasi yang biasa dikenal oleh masyarakat lebih identik dengan sistem zonasi PPDB pada sektor pendidikan di Indonesia. Adanya sistem zonasi mempunyai maksud dan tujuan untuk memberikan akses pendidikan yang merata kepada warga masyarakat tanpa mencari sekolah unggulan/favorit yang terletak pada daerah lain. Penilaian sekolah favorit dalam kehidupan masyarakat memiliki arti bahwa pemerintah belum bisa memberikan pemerataan pendidikan secara adil.

Sistem zonasi PPDB berperan aktif untuk mengatur sekolah – sekolah negeri. SMA Negeri wajib untuk menerima calon siswa yang bertempat tinggal di radius terdekat sekolah minimal 90% dari total jumlah siswa yang harus diterima sekolah umum. Sekolah negeri hanya diperbolehkan menerima paling banyak 5% siswa berprestasi di luar zonasi dan 5% untuk siswa di luar zonasi dengan catatan memiliki alasan khusus, seperti perpindahan tempat tinggal orang tua/wali. Zonasi pada PPDB dapat diselenggarakan lebih objektif, transparan, akuntabel, tidak diskriminatif, berkeadilan dan berkeadilan.

Sistem zonasi PPDB memainkan peran penting dalam pengaturan lembaga pendidikan publik. Sekolah negeri yang dikuasai Pemprov wajib untuk melakukan penerimaan calon siswa yang bertempat tinggal dalam jarak tertentu dari jarak sekolah tersebut, minimal 90% dari banyaknya jumlah siswa yang harus diterima sekolah negeri yang berasal dari radius tersebut. Sekolah negeri hanya diperbolehkan mengambil siswa berprestasi dari luar zonasi maksimal 5 % dan siswa luar zonasi maksimal 5 % karena alasan khusus, seperti perubahan tempat

tinggal orang tua atau wali, dari luar zonasi. Sistem zonasi yang lebih objektif, transparan, bertanggung jawab, tidak diskriminatif, berkeadilan, dan berkeadilan dapat dilaksanakan melalui PPDB.

Selama ini banyak faktor yang menghalangi warga untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas antara lain kendala geografis, kendala transportasi, dan perumahan, antara lain akibat adanya stigma masyarakat tentang sekolah unggulan biasanya letaknya berada di kota-kota besar. Seperti yang terjadi di kota yang memiliki makanan khas lumpia dan winko babatnya yaitu Kota Semarang, sebagai ibu kota Provinsi di Provinsi Jawa Tengah, merupakan lokasi yang strategis di persimpangan jalan pemerintahan dan perekonomian. Selain itu, Semarang juga menjadi salah satu kota besar yang berada di Indonesia, dengan kekayaan sejarah dan kearifan budaya yang masih melekat pada masyarakatnya. Kota Semarang terdiri dari 18 Kecamatan dengan kepadatan penduduk yang berbeda-beda hal ini yang membuat persaingan calon peserta didik baru untuk mendapat sekolah yang mereka inginkan ketat. berikut jumlah SMA Negeri yang dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 1.1 Jumlah Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Semarang 2021

Daftar SMA Negeri Kota Semarang					
NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH	KELURAHAN	KECAMATAN	NOMOR TELEPON
1	SMA N 01 Semarang	Jl. Taman Menteri Supeno No. 1	Mugasari	Semarang Selatan	024 8310447/8318539
2	SMA N 02 Semarang	Jl. Sendangguwo Baru No. 1	Sendangguwo	Pedurungan	024 6715994
3	SMA N 03 Semarang	Jl. Pemuda No. 149	Sekayu 50132	Semarang Tengah	024 3544287
4	SMA N 04 Semarang	Jl. Karangrejo Raya No. 12 A	Srondol Wetan	Banyumanik	024 7471540
5	SMA N 05 Semarang	Jl. Pemuda No. 143 Semarang	Sekayu	Semarang Tengah	024 3543998
6	SMA N 06 Semarang	Jl. Ronggolawe	Gisikdrono	Semarang Barat	024 7605578
7	SMA N 07 Semarang	Jl. Untung Surapati	Bamban Kerep	Ngaliyan	024 7605977
8	SMA N 08 Semarang	Jl. Raya Tugu	Tambak Aji	Ngaliyan	024 8664553
9	SMA N 09 Semarang	Jl. Cemara Raya	Padangsari	Banyumanik	024 7472812
10	SMA N 10 Semarang	Jl. Kapas Utara Raya Genuk Indah	Gebangsari	Genuk	024 6594078
11	SMA N 11 Semarang	Jl. Lamper Tengah	Lamper Tengah	Semarang Selatan	024 8413670
12	SMA N 12 Semarang	Jl. Raya Gunungpati	Plalangan	Gunungpati	024 6932224
13	SMA N 13 Semarang	Jl. Rowosemanding	Wonolopo	Mijen	024 7711024/76672807
14	SMA N 14 Semarang	Jl. Kokrosono	Panggung Lor	Semarang Utara	024 3513404
15	SMA N 15 Semarang	Jl. Kenungmundu Raya No. 34	Sambiroto	Tembalang	024 6719871
16	SMA N 16 Semarang	Jl. Ngadirgo Tengah	Ngadirgo	Mijen	024 70770409

Sumber: <https://scymark.semarangkota.go.id/> diakses pada 3 maret 2021

Sama halnya seperti SMA N 1 Semarang dan SMA N 9 Semarang. Kedua SMA tersebut merupakan dua sekolah yang bergengsi atau menjadi favorit masyarakat yang berada di kawasan zonasinya. Terutama SMA N 1 Semarang merupakan sekolah tertua yang berada di tengah Kota Semarang dimana didirikan pada tahun 1939. Selain sekolah yang mencatatkan sejarah sebagai sekolah tertua

di Semarang, SMA N 1 Semarang juga berhasil mencetak bibit pemimpin seperti Walikota Semarang Hendrar Prihadi⁴. Sama halnya dengan SMA N 9 Semarang yang terletak di wilayah Kecamatan Banyumanik juga memiliki segudang prestasi baik akademik dan prestasi non-akademik yang berada di wilayah zonasinya. Dengan demikian sudah bukan menjadi hal tabu lagi bahwa kedua sekolah tersebut pada tiap tahunnya menjadi sekolah favorit bagi orang tua calon peserta PPDB untuk menyekolahkan putra-putrinya.

Akan tetapi dengan keadaan yang seperti ini, sudah tidak relevan lagi setelah adanya sistem zonasi yang bertujuan untuk pemerataan kualitas pendidikan serta menghapus stigma masyarakat mengenai sekolah favorit. Awalnya kebijakan ini memang memiliki tujuan yang baik, tetapi dalam keberjalanannya masih dijumpai permasalahan-permasalahan yang mendasar seperti: (1) permasalahan penentuan jarak tempat tinggal calon peserta didik dari jarak sekolah, (2) terdapatnya pemalsuan data terkait surat keterangan domisili calon peserta PPDB, (3) dengan menggunakan sistem zonasi, terdapat siswa-siswi yang berprestasi tidak didukung dengan fasilitas sekolah yang memadai⁵.

Sehingga berdasar dengan uraian di atas akan menjadi menarik jika dilakukan penelitian secara lebih lanjut dengan bertujuan untuk menganalisis mengenai peran dari pelaksana kebijakan program sistem zonasi PPDB di kedua sekolah tersebut. Sehingga dengan terdapatnya kondisi sedemikian terangkatlah

⁴ Rahmat Wibisono. *Asa Siswa Berprestasi Masuk SMA Favorit di Semarang* (<https://www.solopos.com/asa-siswa-berprestasi-masuk-sma-favorit-di-semarang-1001117>, diakses tanggal 30 Oktober 2021).

⁵ Anggun Puspito Ningrum. *Daftar Kejanggalan yang Dikeluhkan dalam Sistem Zonasi PPDB SMA Jateng* (<https://jateng.idntimes.com/news/jateng/anggun-puspitoningrum-1/kejanggalan-yang-dikeluhkan-dalam-sistem-zonasi-ppdb-sma-jateng>, diakses tanggal 30 Oktober 2021).

judul penelitian “Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi PPDB SMA di Jawa Tengah Tahun 2021 (Studi Kasus SMA N 1 Semarang dan SMA N 9 Semarang).”

1.2 Rumusan masalah

Dengan latar belakang yang sudah diulas sebelumnya dapat diketahui bahwa Implementasi sistem zonasi pada PPDB SMA di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah masih memiliki beberapa kendala untuk mencapai tujuan dari program tersebut, dengan demikian akan diambil sebuah rumusan masalah yang berkaitan dengan tujuan dari sistem zonasi pada PPDB tersebut, yaitu:

1. Bagaimana implementasi Sistem Zonasi pada tingkat SMA Negeri di Kota Semarang pada tahun 2021?
2. Apa saja permasalahan dalam implementasi Sistem Zonasi pada tingkat SMA Negeri di Kota Semarang pada tahun 2021?
3. Bagaimana solusi dan tindakan yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Jawa Tengah menyelesaikan permasalahan dalam proses implementasi Sistem Zonasi pada tingkat SMA Negeri di Kota Semarang pada tahun 2021?

1.3 Tujuan

Untuk menjadi karya ilmiah yang sesuai pada prinsip penelitian, maka penelitian ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses Implementasi Program Sistem Zonasi PPDB pada tingkat SMA Negeri di Kota Semarang Tahun 2021.
2. Untuk mengetahui permasalahan – permasalahan dalam proses implementasi sistem zonasi pada tingkat SMA Negeri di Kota Semarang pada tahun 2021.

3. Untuk mengetahui solusi dan tindakan yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Jawa Tengah menyelesaikan permasalahan dalam proses implementasi Sistem Zonasi pada tingkat SMA Negeri di Kota Semarang pada tahun 2021.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini, penulis berharap bisa memberikan informasi tentang proses implementasi kebijakan dari pemerintahan, selain itu dapat berguna sebagai ilmu pengetahuan bagi seluruh masyarakat mengenai bagaimana implementasi dari sistem zonasi pada PPDB ditingkat SMA oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Jawa Tengah terkhususnya di Kota Semarang serta peneliti berharap bisa memperkuat teori-teori yang serupa serta dapat menjadi referensi dan wawasan tambahan terhadap penelitian sejenisnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah

Dengan penelitian ini, peneliti berharap tulisan ini bisa memberi manfaat besar untuk pelaku kebijakan terutama Disdikbud Provinsi Jawa Tengah.

2. Bagi Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti berharap dapat menambah pengalaman, serta ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan peneliti

dalam hal peningkatan pengetahuan dan wawasan dalam hal penelitian.

3. Bagi Masyarakat

Penulisan skripsi ini, peneliti berharap bisa memberikan manfaat kepada masyarakat dalam memperluas wawasan dan pengetahuan pada kajian ilmu pemerintahan terkhusus mengenai pelaksanaan program sistem zonasi pada PPDB kepada masyarakat. Dalam penelitian ini juga diharapkan dapat berguna bagi mahasiswa terkhususnya untuk mahasiswa program studi Ilmu Pemerintahan yang juga saat nanti akan melaksanakan penelitian dengan topik dan bahasan yang serupa dapat sebagai acuan penelitian.

1.5 Landasan Teori

1.5.1 Tinjauan Pustaka

Penelitian yang dilakukan sebelumnya dimaksudkan untuk melengkapi penelitian pada saat ini dengan memberikan informasi tambahan dan sebagai pembanding antara penelitian tersebut dengan penelitian lain yang telah dilaksanakan sebelumnya. Penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya dapat digunakan sebagai tolak ukur dan sebagai sumber bahan referensi untuk proyek penelitian saat ini. Hal ini akan menghasilkan sejumlah besar kajian teoritis yang secara garis besar terdapat keterkaitan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan. Penelitian serupa dengan judul yang sama pada penelitian penulis belum ditemukan, berdasarkan tinjauan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan. Tetapi telah ditemukan sejumlah penelitian terkait lainnya yang bisa menjadi

acuan untuk dilakukan rujukan dan material penelitian penulis, antara lain sebagai berikut:

Tabel 1.2 Daftar Tinjauan Pustaka

No.	Peneliti	Judul	Tujuan Penelitian	Metode	Hasil Analisis
1.	Ratih Fenty A. Bintoro, 2018	“Persepsi Masyarakat Terhadap Implementasi Kebijakan Zonasi Sekolah Dalam Penerimaan Peserta Baru (PPDB) Tingkat SMA Tahun Ajaran 2017/2018 di Kota Samarinda”	Penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan perspektif masyarakat dalam proses adopsi aturan zonasi sekolah dalam PPDB untuk tingkat SMA tahun pelajaran 2017/2018 di Kota Samarinda.	Dalam penelitian ini, metodologi kualitatif digunakan melalui penjelasan (explanatory).	Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan aturan zonasi sekolah menciptakan perselisihan masyarakat.
2.	Ahmad Mashudi, 2019	“Kebijakan PPDB Sistem Zonasi SMA/SMK dalam Mendorong Pemerataan Kualitas Sumberdaya Manusia di Jawa Timur”	Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran zonasi dalam penerimaan Siswa Baru Sekolah Menengah Atas/SMK (PPDB) dalam rangka pemerataan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas di Provinsi Jawa Timur.	Metode deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini.	Penelitian ini mengusulkan strategi sistem zonasi PPDB di tingkat SMA/SMK untuk mendorong alokasi SDM unggulan di Jawa Timur. Strategi ini mencegah calon siswa yang kompeten berkumpul di satu sekolah di lokasi tertentu, sehingga mencegah eksklusivitas pendidikan. Kedua, menerapkan kebijakan sistem zonasi memungkinkan akses yang sama ke pekerja yang memenuhi syarat, karena siswa menikmati akses yang sama ke instruktur dan sumber daya pendidikan. Minimnya kesenjangan kualitas lulusan akan meningkatkan persebaran SDM berkualitas di Jawa Timur.
3.	Novrian	“Implementasi	Penelitian ini	Pendekatan	Temuan penelitian ini

	Satria Perdana, 2019	PPDB Zonasi Dalam Upaya Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan”	mengkaji pemanfaatan PPDB Zonasi di Sulawesi Tengah untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan.	kualitatif menjadi metode yang digunakan dalam penelitian ini.	adalah keberhasilan zonasi PPDB di Provinsi Sulawesi Tengah dalam pemerataan akses dan kualitas pendidikan. Distribusi siswa telah bergerak lebih dekat ke rumah siswa, dan input berkualitas telah menyebar ke sekolah lain, menghilangkan perbedaan antara sekolah luar biasa dan tidak unggul.
4.	Hasbullah dan Syaiful Anam, 2019	“Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kabupaten Pamekasan”	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur evaluasi kebijakan zonasi PPDB SMP di Kabupaten Pamekasan.	Pendekatan <i>purposive sampling</i> digunakan pada penelitian ini untuk pendekatan peneliti dalam penelitiannya.	Karena reaksi masyarakat di lokasi penelitian, SMPN 3 Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan beragam, penelitian ini berfokus pada analisis penerapan kebijakan Sistem Zonasi.

Sumber: Diolah oleh peneliti

Keempat penelitian tersebut di atas memiliki persamaan dan perbedaan yang signifikan yang diteliti dalam penelitian ini. Kesamaan keempat penelitian tersebut berawal dari fakta bahwa mereka semua fokus pada topik penelitian yang sama tentang regulasi sistem zonasi di Indonesia untuk PPDB sekolah. Kemudian, pada beberapa penelitian di atas juga memiliki kesamaan dalam penggunaan metode penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada tingkat sekolah yang diteliti dan lokasi penelitian.

1.5.2 Tinjauan Teori

1. Teori Kebijakan Publik

Easton menggambarkan kebijakan publik sebagai distribusi nilai yang otoritatif untuk seluruh masyarakat, serta transfer nilai secara paksa kepada semua

warga negara. Laswell dan Kaplan menunjukkan bahwa kebijakan publik juga dapat didefinisikan sebagai program tujuan, nilai, dan praktik yang direncanakan, atau sebagai program kegiatan dengan tujuan dalam nilai praktik yang diarahkan.⁶ Anderson juga mendefinisikan kebijakan publik sebagai rangkaian tindakan yang bertujuan yang diikuti oleh aktor di set atau sekelompok pemain dalam menangani masalah atau topik yang menjadi perhatian, atau tindakan yang dimaksudkan untuk diikuti dan dilakukan oleh orang-orang dan bahkan sekelompok aktor. untuk mengatasi suatu masalah.⁷

Menurut Michael E. Porter, keunggulan kompetitif suatu negara ditentukan oleh kapasitasnya untuk mendorong daya saing semua aktor di dalam negeri. Dengan persaingan pada tingkatan global yang semakin ketat, sektor publik bertugas menciptakan lingkungan yang mendorong setiap aktor pembangunan untuk menjadi aktor kompetitif di pasar. Lingkungan ini hanya dapat tercipta secara efektif bila ada rasa ketertiban umum. Akibatnya, kebijakan publik yang benar adalah kebijakan yang memberikan dorongan kepada semua orang supaya dapat meningkatkan daya saing masing-masing daripada terjerumus ke dalam pola ketergantungan.

Robert Eyestone mengartikan kebijakan publik merupakan “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Banyak pihak berpendapat bahwa istilah tersebut memiliki konotasi yang terlalu luas dan sulit dipahami, karena

⁶ Susy Susilawati, “Analisis Kebijakan Publik Bidang Keselamatan dan Kesejahteraan Kerja di Kota Tasikmalaya”, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang 2007, p. 24.

⁷ Ibid

kebijakan publik dapat mencakup berbagai topik. Kebijakan publik, menurut Nugroho, memiliki dua ciri yang membedakan, yaitu⁸:

- i. Kebijakan publik adalah sesuatu yang mudah dipahami karena mengacu pada tindakan yang diambil untuk melakukakn capaian dalam tujuan nasional.
- ii. Kebijakan publik adalah sesuatu yang dapat dengan mudah diukur karena metriknya langsung, ini adalah jumlah kemajuan yang dicapai untuk mencapai tujuan.

2. Teori Implementasi

Salah satu tahapan yang termasuk dalam prosedur pembuatan kebijakan adalah berbicara tentang implementasi. Menurut aturan umum, setiap kebijakan publik diikuti oleh implementasi kebijakan tersebut pada tahun berikutnya. Dalam proses pembuatan kebijakan, implementasi dipandang sebagai bentuk yang paling penting dan tahap yang kritis. Hal tersebut kemudian diperkuat oleh pernyataan George C. Edward III yang menyatakan bahwa keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil diimplementasikan jika tidak dilaksanakan dengan efektif. Mengikuti keluarnya arahan yang sah dari suatu kebijakan, implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang diamati, yang mencakup dalam hal upaya pengelolaan input agar menghasilkan sebuah output untuk kepentingan masyarakat luas.⁹

⁸ Riant Nugroho Dwijowijoto, *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi* (Jakarta: Elek Media Komputindo, 2003), p.9

⁹ Haedar Akib, "Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1 No.1, Tahun 2010, halaman 1.

Implementasi adalah proses yang dinamis, yang merupakan tahap agar kebijakan dapat mencapai tujuannya. Ketika seorang pelaksana kebijakan terlibat dalam suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan dengan tujuan mencapai keberhasilan yang sesuai pada tujuan dibuatnya sebuah kebijakan, ini disebut sebagai tahap implementasi¹⁰. Pelaksana kebijakan terlibat dalam kegiatan selama fase implementasi untuk mencapai tujuan kebijakan. Model Donald Van Metter dan Carl Van Horn adalah dua model teori implementasi. Menurut Van Metter dan Van Horn, ada 6 (enam) faktor yang menentukan kinerja kebijakan, yaitu¹¹:

1. Ukuran dan tujuan Kebijakan

Keberhasilan implementasi kebijakan hanya dapat ditentukan jika ruang lingkup dan tujuan kebijakan sesuai dengan lingkungan sosial budaya di mana pelaksana kebijakan beroperasi.

2. Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat bergantung pada kemampuan proses tersebut dalam memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif.

3. Karakteristik Agen pelaksana

Agen pelaksana adalah organisasi formal dan informal yang akan terlibat dalam implementasi kebijakan, yang akan sangat dipengaruhi oleh karakteristik dan preferensi yang sesuai dari agen pelaksana. Selain itu, ketika menentukan agen pelaksana, ruang lingkup atau area implementasi

¹⁰ Haedar Akib dan Antonius Tarigan. "Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya" Jurnal Baca, Volume 1, Agustus 2008, Universitas Pepabari Makassar, Halaman 3.

¹¹ Agostiono, Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn (Jakarta: Rajawali Press, 2010), halaman 154.

kebijakan harus dipertimbangkan. Semakin luas cakupan kebijakan, semakin banyak agen yang terlibat.

4. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas

Koordinasi merupakan mekanisme paling penting dan ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.

5. Sikap atau kecenderungan (Disposisi)

Sikap lembaga pelaksana terhadap penerimaan atau penolakan akan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dibuat bukanlah hasil dari mereka yang terlibat langsung dalam kebijakan yang mengetahui kesulitan dan merasakan permasalahannya.

6. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik

Menurut Van Metter dan Van Horn, lingkungan eksternal harus diperhatikan ketika mengevaluasi keberhasilan implementasi kebijakan publik. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang tidak menguntungkan dapat menghambat implementasi kebijakan.

Lebih lanjut yang dimaksudkan oleh Van Metter dan Van Horn adalah:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Dalam pengimplementasian kebijakan memiliki ukuran dalam kesuksesan kebijakan ketika dilaksanakan dengan penilaian tujuan kebijakan yang

dibuat sudah sesuai dengan tujuan dibuatnya kebijakan atau belum sesuai dengan kebijakan yang telah dilaksanakan.

2. Sumber Daya

Untuk implementasi suatu kebijakan membutuhkan beberapa sumberdaya diantaranya: Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber daya anggaran, dan sumber daya terkait sarana dan prasarana. Sumber daya manusia yang dimaksudkan adalah para agen pelaksana kebijakan yang menjalankan program kebijakan. Sumber daya anggaran berguna dalam pendanaan dalam implementasi program kebijakan untuk menopang pembiayaan agen pelaksanaan pelaksana kebijakan. Dan yang terakhir sumber daya sarana dan prasarana adalah alat yang digunakan agen pelaksana untuk melakukan pengimplementasian yang didapat dari penggunaan sumber daya anggaran. Dari ketiga aspek sumber daya menjadi indikator penilaian kebijakan sudah berjalan dengan baik atau belum.

3. Karakter Agen Pelaksana

Agen pelaksana sebagai pelaksana pengimplementasian kebijakan masing-masing individu memiliki karakter sifat dalam pelaksanaan kebijakan. Masing-masing individu agen pelaksana juga mempengaruhi penilaian implementasi kebijakan sudah berjalan baik atau belum terlaksana dengan baik.

4. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas

Dari banyaknya agen pelaksana terbentuk organisasi dimana organisasi ini beraktivitas dengan organisasi lain yang masih berkaitan dengan kebijakan

yang dilaksanakan kemudian beraktivitas bersama sebagai implementor kebijakan. Komunikasi antar organisasi saat melaksanakan aktivitas dalam implementasi kebijakan baik atau buruknya dapat dinilai dalam kesinergisan saat antar organisasi saling berinteraksi untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

5. Sikap atau Kecenderungan (Disposisi)

Sikap yang dimaksudkan adalah bagaimana pelaksana terutama dalam lingkup masyarakat bersikap positif menerima terhadap adanya implementasi kebijakan atau bersikap negatif menolak pengimplementasian dari suatu kebijakan. Semakin banyak sikap positif masyarakat menerima adanya kebijakan dilaksanakan maka kebijakan dapat dinilai baik dan sebaliknya jika masyarakat bersikap negatif atau menolak untuk pelaksanaan kebijakan dijalankan maka kebijakan yang telah dilaksanakan perlu ditinjau kembali mengapa ada yang menolak.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Lingkungan eksternal, terutama lingkungan ekonomi, sosial, dan politik, mempengaruhi implementasi kebijakan. Konteks ekonomi, sosial, dan politik berdampak pada evaluasi kebijakan.

1.6 Operasional Konsep

Implementasi kebijakan program sistem zonasi dalam ranah PPDB SMA di Kota Semarang tahun 2021 merupakan program pendidikan yang dicanangkan pemerintah pusat dan dijalankan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Konsep program dari kebijakan sistem zonasi yaitu memberikan pemerataan pelayanan

pendidikan kepada masyarakat melalui penentuan lokasi radius jarak pada sekolah dengan tempat tinggal (domisili) calon peserta didik baru saat penjarangan PPDB.

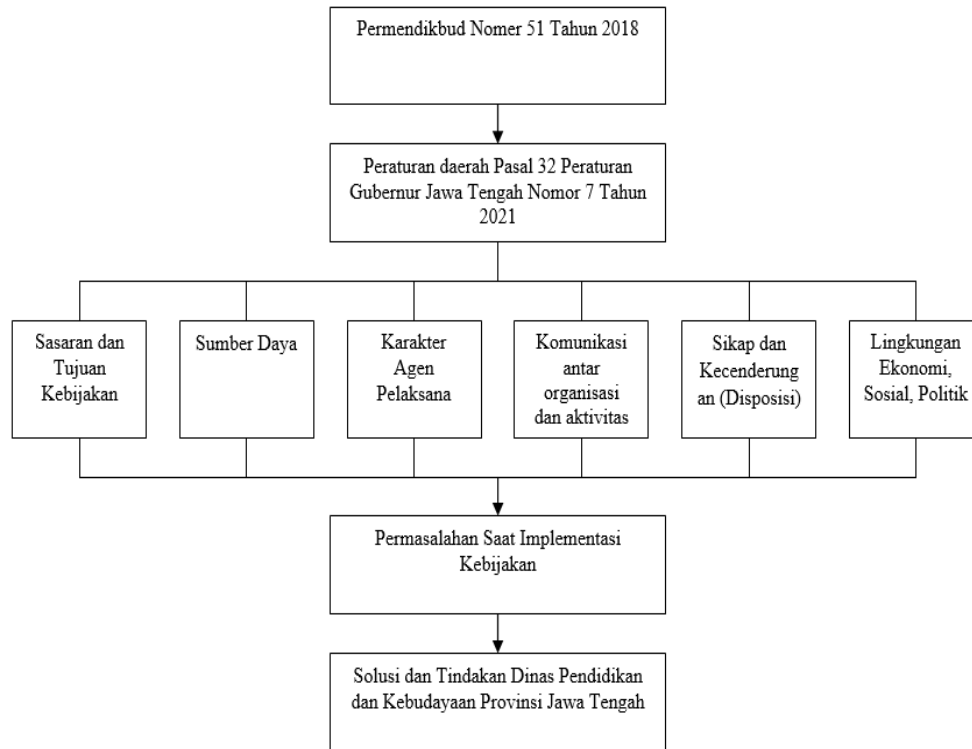
Pada penelitian ini aspek yang hendak diteliti yaitu:

1. Implementasi kebijakan program sistem zonasi PPDB SMA tahun 2021 yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdik) Provinsi Jawa Tengah bersama SMA di Kota Semarang yang dianalisis dan ditinjau menggunakan teori implementasi kebijakan Van Metter dan Van Horn yaitu:
 - a. Ukuran dan tujuan kebijakan
 - b. Sumber daya
 - c. Karakter agen pelaksana
 - d. Komunikasi antar organisasi dan aktivis
 - e. Sikap dan kecenderungan (Disposisi)
 - f. Lingkungan ekonomi, sosial, politik
2. Permasalahan yang ditemukan pada pengimplementasian kebijakan sistem zonasi PPDB di SMA Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 seperti: peserta PPDB yang mengakali persyaratan terkait domisili supaya masuk pada SMA Negeri yang diinginkan, adanya miskomunikasi antara panitia Tingkat Provinsi dengan Panitia Penyelenggara di masing-masing satuan sekolah SMA Negeri di Kota Semarang, dan perubahan peraturan terkait surat ketereangan domisili Kartu Keluarga (KK).

3. Solusi dan penyelesaian permasalahan implementasi kebijakan sistem zonasi PPDB di SMA Kota Semarang oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dalam menangani permasalahan: peserta PPDB yang mengakali persyaratan terkait domisili supaya masuk pada SMA Negeri yang diinginkan, adanya miskomunikasi antara panitia Tingkat Provinsi dengan Panitia Penyelenggara di masing-masing satuan sekolah SMA Negeri di Kota Semarang, dan perubahan peraturan terkait surat ketereangan domisili Kartu Keluarga (KK).

1.7 Kerangka Berpikir

Gambar I.I. Model Kerangka Berpikir Implementasi Kebijakan,



Sumber: diolah oleh peneliti

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Metode Penelitian yang peneliti gunakan mengenai implementasi sistem zonasi pada PPDB SMA Negeri di Kota Semarang adalah Menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian deskriptif digunakan untuk melakukan kajian lebih mendalam pada implementasi sistem zonasi pada PPDB SMA Negeri di Kota Semarang. Menurut Creswell, penelitian kualitatif adalah cara memeriksa dan memahami fenomena kunci dengan mewawancarai peserta studi dan mengajukan pertanyaan umum dan luas.¹² Dalam penelitian kualitatif, banyak melibatkan

¹² John W. Creswell. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Belajar, Yogyakarta. 2016, hal.217.

peneliti untuk menyelami settingan dari penelitian dikarenakan para peneliti kualitatif perlu untuk menjelaskan sejumlah prosedur penelitian untuk menunjukkan hasil penelitian benar-benar konsisten dan reliabel.

Jenis metode pendekatan penelitian yang telah digunakan oleh penelitian ini yaitu studi kasus (case study). Arti studi kasus adalah salah satu bentuk penelitian yang mengeksplorasi dari beberapa sistem terkait (bounded system) atau permasalahan. Pendekatan studi kasus adalah suatu pendekatan yang mendeskripsikan objek/peristiwa secara umum maupun menyeluruh dalam suatu daerah atau sosial masyarakat melalui pemeriksaan secara rinci dengan kondisi kontekstual yang saling berkaitan satu sama lain¹³.

1.8.2 Lokasi Penelitian

Lokasi ini akan dilakukan di beberapa tempat seperti di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Jawa Tengah, Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Wilayah I, SMA N 1 Semarang, dan SMA N 9 Semarang. Dengan obyek penelitian yang meliputi, penanggung jawab program sistem zonasi pada sistem PPDB di Kota Semarang dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Jawa Tengah dan Ketua Panitia Penyelenggara PPDB pada SMA Negeri 1 Semarang dan SMA Negeri 9 Semarang yang berada pada Kota Semarang sebagai pelaksana program sistem zonasi.

¹³ Creswell dalam J.R. Raco. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulan*. PT. Gramedia Widiasarana, Jakarta. 2010, hal.49.

1.8.3 Sumber Data

Data yang akan digunakan pada penelitian ini dibagi menjadi 2 kelompok yaitu:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dengan cara menggali sumber data oleh peneliti secara langsung. Dalam hal ini penulis mencoba mencari data mengenai implementasi dan kesiapan melalui data yang diperoleh langsung dari panitia pelaksana PPDB tahun 2021 dari pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Jawa Tengah, Pelayanan SMA Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Provinsi Jawa Tengah, Ketua Panitia pelaksana PPDB tahun 2021 SMA Negeri 1 Semarang, Ketua Panitia pelaksana PPDB tahun 2021 SMA Negeri 9 Semarang, peserta PPDB tahun 2021 SMA Negeri 1 Semarang, dan Peserta PPDB tahun 2021 SMA Negeri 9 Semarang.
2. Data Sekunder, yaitu data yang didapat dari berbagai sumber yang ada baik itu buku, laporan, jurnal, dan lain lain. Sumber data ini kemudian digunakan sebagai pelengkap dalam memberikan keterangan dan digunakan sebagai bahan perbandingan.

1.8.4 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Metode Interview

Wawancara dapat diartikan sebagai salah satu upaya untuk memperoleh informasi yang dalam terhadap informan dengan

pewawancara yang menjadi obyek penelitian, seperti menurut Sugiyono “wawancara adalah cara untuk bertukar informasi melalui sebuah tanya jawab antar dua orang yang dapat dikonstruksikan sebagai sebuah makna dalam topik tertentu.”¹⁴ Dalam pengambilan data peneliti akan menggunakan teknik wawancara kepada informan pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Jawa Tengah, Pelayanan SMA Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Provinsi Jawa Tengah, Ketua Panitia pelaksana PPDB tahun 2021 SMA Negeri 1 Semarang, Ketua Panitia pelaksana PPDB tahun 2021 SMA Negeri 9 Semarang, peserta PPDB tahun 2021 SMA Negeri 1 Semarang, dan Peserta PPDB tahun 2021 SMA Negeri 9 Semarang.

2. Metode Dokumentasi

Teknik dokumentasi mengumpulkan data kualitatif dengan melihat atau mengevaluasi dokumen yang dibuat oleh subjek atau orang lain atas namanya. Dokumentasi adalah metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk lebih memahami perspektif subjek. Teknik dokumentasi mengumpulkan data kualitatif dengan melihat atau mengevaluasi dokumen yang dibuat oleh subjek atau orang lain atas namanya. Dokumentasi adalah metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk lebih memahami perspektif subjek. Hal ini dapat dicapai melalui penggunaan bahan tertulis serta dokumen lain yang dibuat atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.¹⁵ Penulis dapat mengumpulkan data berupa catatan studi dengan mengumpulkan data dari

¹⁴ Sugiyono “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&d*” Bandung : Alfabeta. 2009

¹⁵ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 143.

dokumen-dokumen yang ada. Teknik dokumentasi ini dapat digunakan untuk melakukan pengumpulan data yang penulis tidak dapatakan dan hanya diperoleh melalui observasi atau wawancara secara daring maupun luring.

1.8.5 Metode Pengolahan Data

Setelah pegumpulan data berhasil maka penulis melakukan analisis dengan analisa deskriptif, yang berarti penulis akan mencoba menggambarkan data yang diperoleh mengenai implementasi program sistem zonasi pada PPDB SMA Negeri yang berada pada Kota Semarang. Dalam menganalisis data, penulis akan memulai dengan reduksi data, penyajian data, kemudian kesimpulan atau verifikasi. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi adalah proses pemilihan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi materi tidak terstruktur yang seringkali bersumber dari catatan lapangan. Proses ini berlanjut selama penyelidikan, bahkan sebelum dimulainya pengumpulan data, seperti yang ditunjukkan oleh kerangka konseptual untuk penelitian, masalah studi, dan strategi peneliti untuk mengumpulkan data.¹⁶

2. Penyajian Data

Dalam penyajian data, informasi dari berbagai sumber dikumpulkan, dan ada kemungkinan bahwa kesimpulan dan tindakan akan direkomendasikan. Data kualitatif bisa disajikan dalam berbagai macam cara, termasuk dalam teks naratif, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Format ini menggabungkan

¹⁶ Ahmad Rijali. "Analisis Data Kualitatif" Jurnal Alhadharah Vol. 17 No. 33 hlm. 91 Tahun 2018

data secara logis dan mudah untuk diakses, sehingga kesimpulannya dapat mudah dipahami apa yang sedang terjadi dan seperti apakah baik benar atau tidaknya.¹⁷

3. Kesimpulan atau Verifikasi

Sementara para peneliti berada di lapangan, peneliti terus-menerus berusaha untuk menarik kesimpulan. Dari awal pengumpulan data, peneliti kualitatif berusaha memahami sesuatu dengan memberikan catatan terkait keteraturan pola (dalam catatan teoretis), penjelasan, konfigurasi yang mungkin, jalur sebab akibat, dan proposisi. Banyak kesimpulan ini diperlakukan secara leluasa, menyisakan ruang untuk keraguan dan skeptisisme, tetapi kesimpulan-kesimpulan itu telah ditarik. Itu tidak segera jelas, tetapi menjadi lebih rinci dan berakar kuat seiring berjalannya waktu¹⁸.

¹⁷ Ahmad Rijali, op.cit., hlm. 94

¹⁸ *Ibid.*